



Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam

ISSN : 2621-0312

e-ISSN : 2657-1560

Vol. 4 No. 1 Tahun 2021

Doi : 10.21043/politea.v4i1.9713

<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea>

Implikasi Demokrasi Semu dan Politik Pencitraan Berbingkai Islam Terhadap Good Governance

Mustiqowati Ummul Fitriyyah, Atika Windi Astuti, Muhammad Saiful Umam, Risma Lutfia Wahyu Ningsih

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, PW Fatayat NU Riau, IAIN Kediri, Universitas Riau

mustiqowati@uin-suska.ac.id , atika.windi@student.unri.ac.id , saifulmu7@gmail.com ,
rismalutfiawn@gmail.com

Abstract

PSEUDO DEMOCRACY:

POLITICAL IMAGING WITHIN ISLAMIC FRAMEWORK AND IMPLICATIONS FOR GOOD GOVERNANCE

Democracy and religion are two very different things that are integrated into today's Indonesian politics. As a Muslim-majority country, that kind of politics will cause the revival of Islamic political identity as a means to create political imaging to win over the voices of Muslims in Indonesia or what is often called the Politicization of Islam. This method is not allowed to be implemented in Indonesia which adheres to a democratic system. Principally, political imaging is carried out in order to influence society by instilling opinions. The goal of this imaging is to appear to be flawless in the public's eye when it is factually the most flawed one. That kind of imaging is certainly contradictory when viewed from the perspective of Islamic political communication. This article aims to see how politics should be done from an Islamic perspective. The method used to study the problems is a qualitative method. The result of this study shows that the plurality that exists in Indonesia requires special attention from the government to manage the political religions which can create controversy between religious communities. In order to build an essential democracy in Indonesia and avoid the presence of political power of religious identity in the political arena, every candidate must avoid identity involvement in the electoral arena as a way of avoiding the awakening of identity and its sentiment that occurs in Indonesia.

Keywords: Pseudo-Democracy, Political Imaging, Good Governance

Abstrak

Demokrasi dan agama adalah dua hal yang sangat berbeda yang terintegrasi ke dalam politik Indonesia saat ini. Sebagai negara mayoritas Muslim, politik semacam itu akan menyebabkan kebangkitan kembali identitas politik Islam sebagai sarana pencitraan politik untuk merebut suara umat Islam di Indonesia atau yang sering disebut Politisasi Islam. Cara ini tidak diperbolehkan untuk diterapkan di Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Pada prinsipnya, pencitraan politik dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat dengan cara menanamkan opini. Tujuan dari pencitraan ini adalah untuk tampil sempurna di mata publik padahal sebenarnya pencitraan itulah yang paling cacat. Pencitraan seperti itu tentu saja kontradiktif jika dipandang dari perspektif komunikasi politik Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengamati bagaimana politik seharusnya dilakukan dari Perspektif Islam. Metode yang digunakan untuk mempelajari masalah tersebut adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemajemukan yang ada di Indonesia memerlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk mengelola politik agama yang dapat menimbulkan kontroversi antar umat beragama. Untuk membangun demokrasi yang utama di Indonesia dan menghindari adanya kekuatan politik berbasis identitas agama di arena politik, setiap calon harus menghindari keterlibatan identitas di arena pemilu sebagai cara untuk menghindari bangkitnya identitas dan sentimennya yang terjadi di Indonesia.

Kata kunci: Demokrasi semu, politik pencitraan, good governance

Pendahuluan (Introduction)

Pada beberapa negara berkembang, demokrasi ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, demokrasi menyediakan kesempatan untuk menata masyarakat politik dengan mekanisme kompetensi dan kepatuhan pada konstitusi, tetapi di sisi lain demokrasi dapat merusak demokrasi itu sendiri. Sisi yang kedua ini lebih banyak menjelma dalam bentuk konflik antar etnis, agama, khusus di kalangan masyarakat yang plural. Dalam hal ini fungsi demokrasi yang merupakan solusi konflik, malah menjadi pendorong konflik itu sendiri (Suntara, 2010). Indonesia, sebagai negara yang bergerak menuju pada *postauthoritarian*, setelah jatuhnya kekuatan militer Soeharto 1998, Indonesia berada dalam masalah yang pelik. Demokratisasi di Indonesia menghadapi ujian yang cukup serius. Konflik antaretnis, antaragama dan gerakan separatisme adalah tantangan tersendiri bagi demokrasi (Suntara, 2010). Demokrasi yang baik seharusnya mengubah birokrasi menjadi instrument pelayanan masyarakat, Bukan hanya mencari simpati dengan pencitraan politik untuk mendapatkan kedudukan namun setelahnya hanya semu dan tidak menguntungkan bagi pemilih.

Makna demokrasi bukan hanya sekadar kebebasan menyampaikan pendapat. Begitu pula dalam sistem pemerintahan, demokrasi belum bisa dikatakan ideal dengan sekadar dibuatnya sistem pemilihan umum. Demokrasi yang sehat haruslah berjalan sehat tahapan pemilunya, termasuk kontestasinya. Tanpa itu, demokrasi hanyalah pepesan kosong nan semu. Sebagai negara dengan mayoritas muslim, maka ini memicu adanya kebangkitan politik identitas Islam sebagai upaya pembentukan citra diri dengan mengandalkan Islam sebagai senjata untuk merebutkan suara mayoritas muslim yang ada di Indonesia atau yang kerap disebut dengan Politisasi Islam. Cara seperti ini tidak dibenarkan untuk dilakukan di Indonesia yang menganut sistem Demokrasi.

Penonjolan warga negara muslim harus memilih pemimpin muslim ini bahkan menjadi sebuah polemik yang membelah publik sepanjang pemilihan umum yang berlangsung. Sebagai contoh yaitu pemilihan gubernur Jakarta dan Pemilu Presiden beberapa tahun lalu. Identitas Islam dijadikan sebagai acuan untuk melakukan pencitraan politik. Moment-moment Islam dijadikan sebagai senjata kampanye perpolitikan. Seperti momentum Reuni 212 di Monas pada Ahad, 2 Desember 2018. “*Ingat semuanya sudah saatnya 2019 ganti presiden, Haram pilih presiden dari partai Penista Agama*”, begitu propaganda dari salah seorang petinggi sebuah ormas kala itu. Hal lainnya yang menjadi penguat adalah tameng Islam yang dijadikan sebagai bahan pencitraan perpolitikan ini terlihat pada media cetak (Baliho, Spanduk, dll) yang terpajang pada setiap usungan partai politik. Seperti dengan menyertakan ayat-ayat Al-Quran, hadist, dengan menonjolkan visi misi pengusung kandidat dari para ijtima, background kepemimpinan seperti kiai, dll. Bahkan momentum pilkada Jakarta juga telah menunjukkan sejumlah isu kampanye yang menyita energi bangsa bukan cuma publik Jakarta tapi juga masyarakat Indonesia pada umumnya, antar lain kasus Surat Al Maidah ayat 51 yang berujung pada mobilisasi massa dari berbagai daerah di tanah air untuk datang berunjuk rasa di Jakarta, sampai beredarnya opini publik ‘Saya Muslim, saya pilih Pemimpin Muslim’.

Politik pencitraan pada prinsipnya diupayakan untuk mempengaruhi masyarakat dengan cara menanamkan opini. Tujuannya adalah agar terlihat sempurna di mata publik, meskipun sesungguhnya bukanlah seperti pada kenyataannya. Pencitraan bukan lagi sekadar memoles sisi negatif politisi yang secara manusiawi memiliki kekurangan, melainkan sudah menjadi lampu aladin yang diharapkan dapat mengubah hitam menjadi putih (Kristiadi, 2008). Praktik pencitraan semacam ini tentu bertentangan jika ditinjau dari perspektif komunikasi Politik Islam. Membangun pencitraan dalam Islam adalah sebetulnya upaya ketulusan untuk pembaharuan dan penyempurnaan diri kearah yang lebih baik, dengan prinsip kejujuran dan kebenaran. Pesan dalam komunikasi Islam harus disampaikan secara otentik, menghindari fitnah dan sebagainya. Kata kuncinya ialah kejujuran bukan sekadar gimik yang artifisial.

Instrumen lain yang tak kalah penting dalam pencitraan politik yakni kredibilitas. Dimana tindakan dari kandidat harus sesuai dengan yang diucapkan. Hal tersebut dapat dinilai dari penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan. Di sini *track record* memiliki peranan yang strategis dan signifikan. Penerepan *good governance* dapat menjadi tolak ukur bahwa pencitraan politik yang dilakukan memiliki kredibilitas yang tinggi. Namun sebaliknya jika *good governance* tidak terlaksana dan kredibilitas dari kandidat di nilai lemah maka kandidat akan kehilangan kepercayaan publik. Keberhasilan dari pencitraan publik dilihat dari terjaganya kepercayaan publik. Kepercayaan publik merupakan sebetulnya konsep yang bersifat multifaset yang mana mengenai konsensus dasar di antara anggota masyarakat pada nilai-nilai kolektif, prioritas dan perbedaan serta

penerimaan implisit masyarakat dimana mereka hidup. Aspek kepercayaan mengacu pada kepercayaan kepada pemerintah, pemerintah harus bekerjasama dengan para pemangku kepentingan yang terkait dalam mengelola aspirasi dari masyarakat atau pemilih. Karena apabila pemerintah tidak mampu mengelola dan mewujudkan harapan warganya maka akan dapat merusak kepercayaan yang sudah diberikannya. Oleh sebab itu, kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus kredibel untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat (Goldmas, Smith, 2010).

Dari landasan di atas, penulis bertujuan untuk menganalisis demokrasi semu dan politik pencitraan berbingkai Islam yang terjadi di tengah fenomena citra kinerja pemerintahan Anies Baswedan yang didukung oleh gerakan 212 pada tahun 2018. Hal yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya demokrasi semu yakni mengamalkan Politik pencitraan dari pespektif komunikasi Islam harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip komunikasi Islam, yaitu menekankan pada unsur pesan (*message*), atau nilai-nilai yang disampaikan harus sesuai dengan ajaran Islam, cara (*how*) penyampaiannya juga mengandung kejujuran, yakni gaya bicara yang digunakan harus ditopang dengan kesantunan dan menjunjung etika. Serta pencitraan politik terhadap *good governance*, dimana pencitraan politik dengan kredibilitas yang baik dapat mempertahankan pencitraan politik yang menerapkan komunikasi Islam tanpa terlepas juga menerapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pembahasan (discussion)

Politik Pencitraan dan Demokrasi Semu dalam Konteks Good Governance

Pencitraan merupakan kesan yang sengaja diciptakan dari suatu objek, orang atau organisasi. Pencitraan awalnya identik dengan kegiatan kehumasan (*public relations*) dalam dunia bisnis. Tetapi terminologi ini bergeser pada kegiatan partai politik, sehingga dinamika perpolitikan erat dengan istilah politik pencitraan. Dalam konteks perpolitikan Indonesia misalnya, politik pencitraan menjadi bahasa sehari-hari yang lazim disajikan oleh media massa cetak maupun elektronik. Istilah politik pencitraan semakin kencang berhembus dalam percakapan masyarakat Indonesia ketika kaum akademisi maupun praktisi menjadikannya sebagai bahan diskusi ilmiah dalam berbagai kesempatan (Azhar, 2017). Istilah tersebut menjadi kian santer terdengar utamanya saat menjelang hajatan demokrasi semisal pemilu.

Term politik pencitraan dalam perpolitikan Indonesia mulai berkembang sejak berubahnya sistem politik Indonesia dari monopolitik kepada sistem multi partai. Sebagaimana disebutkan Anwar Arifin, bahwa dalam konteks perpolitikan di Indonesia, ontran-ontran pencitraan politik semakin mengkristal ketika Indonesia menerapkan sistem pemilu langsung berdasarkan suara terbanyak. Janji politik yang dikemas dengan berbagai bentuk dan disebarakan melalui media massa

merupakan salah satu bentuk pencitraan politik. (Anwar, 2003). Bagi para politisi, pencitraan sangat penting karena dapat mempengaruhi perolehan suara pada pemilihan umum. Jika partai beserta para politisi di dalamnya mampu membangun citra positif, maka besar kemungkinan partai tersebut akan berhasil menarik simpatisme dan dukungan kuat dari masyarakat. Akibat begitu pentingnya citra bagi partai politik, maka dibutuhkan konstruksi atau langkah-langkah untuk membangun dan membentuk citra positif partai politik agar makin mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.

Semakin terbukanya era demokrasi mendorong setiap partai berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Karena dalam era demokrasi, kompetisi antara parpol semakin ketat, sehingga salah satu tugas berat bagi parpol adalah bagaimana caranya agar parpol tersebut bisa diterima oleh masyarakat. Kondisi tersebut kemudian mendorong partai berupaya menguatkan keberadaannya dengan berbagai upaya dan strategi. Ada yang menunjukkan eksistensinya dalam menonjolkan programnya, ada yang menonjolkan ketokohan dalam parpolnya, simbol-simbol, jargon-jargon hingga singkatan nama. Hal itu semua dilakukan partai dalam rangka politik pencitraan sehingga mampu membentuk solidaritas dan soliditas. Singkatnya, politik pencitraan merupakan salah satu strategi *marketing* untuk memenangkan kontestasi politik.

Di Indonesia, demokrasi yang menjadi instrumen politik paling sah adalah Pemilu. Pemilu merupakan proses yang selayaknya ditempuh untuk memperbaiki kualitas demokrasi yang berlangsung di dunia ketiga, sekaligus sebagai upaya untuk menghindari adanya praktik demokrasi semu (*pseudo democracy*) yang dapat memberangus demokrasi itu sendiri. Proses pencitraan politik yang sering terjadi dalam momen pemilu dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak individu agar terbuka peluang dan partisipasi dalam menentukan pemimpin sebagai bagian yang dipercaya dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan. Namun, dalam demokrasi terdapat ancaman yakni *pseudo democracy*. Hal ini dikarenakan demokrasi yang dianut di Indonesia belumlah sempurna dan kokoh. Hal itu terjadi lantaran penikmat demokrasi, pada kenyataannya ialah segelintir kaum elite saja. Biaya seseorang untuk maju kedalam gelanggang pemilu diyakini sangatlah tinggi. Karena faktor tingginya *cost* politik itulah demokrasi di Indonesia masih memiliki catatan serius.

Politik pencitraan sering terjadi beriringan dengan pelaksanaan demokrasi, sebagai upaya untuk memikat hati masyarakat agar memilih kandidat yang diusung. Namun pada pelaksanaannya, demokrasi yang dijalankan malah kebanyakan menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya, atau sering disebut dengan demokrasi semu. Ini yang menjadi kendala ketika para praktisi politis menggunakan cara-cara tidak sehat untuk menduduki kekuasaan, apalagi menjadikan agama sebagai tameng penguat dari pencitraan politik tersebut. Politik pencitraan lebih kerap ditampilkan sebagai ajang membungkus kebohongan dengan segala pernak-pernik kesalehan yang

artifisial. Terlebih dengan menggunakan agama sebagai pembungkusnya. Praktik semacam ini nyatanya terbukti cukup efektif untuk menarik simpati massa.

Fragmentasi politik pencitraan yang ditampilkan oleh elit politik di Indonesia, erat kaitannya dengan penjelasan Jon Simons, ia menegaskan bahwa politik demokratis modern adalah politik pencitraan, di mana urusan penampilan lebih penting dari substansi, dan kepribadian lebih penting daripada kebijakan (Simon, 2006). Namun menariknya dari perkembangan demokrasi di Indonesia, masyarakat mulai banyak belajar untuk menterjemahkan proses simbolisme dan pencitraan yang dilakukan para elit politik. Terdapat masyarakat yang mulai cerdas menilai, bahwa apa yang dilakukan oleh seorang kandidat atau satu partai pada saat menjelang Pemilu adalah bentuk gimik dan pencitraan. Keduanya dilakukan agar partai atau kandidat yang bersangkutan dianggap baik dan layak untuk dipilih. Inilah sesungguhnya demokrasi semu (*Pseudo Democracy*).

Citra menempati unsur terpenting yang menjadi pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya, maka tidak mengherankan jika politisi memanfaatkan konsep citra untuk menjembatani jarak antara perilaku pemilih yang dipahami politisi dengan apa yang sesungguhnya tersimpan di benak para pemilih (Newman & Kenworthy, 1999). Sebenarnya praktik demokrasi semu (*pseudo democracy*) yang memberangus demokrasi itu sendiri. Hal ini juga dengan masa *frozen democracy*. Demokrasi yang terjadi adalah *democracy pseudo* dimana demokrasi dalam keadaan semu dan beku. Penikmati demokrasi ini hanya segelintir kaum elite saja. Sehingga, pemerintah perlu merefleksikan dan mengidentifikasi formulasi yang tepat untuk memanifestasikan demokrasi secara substantif ke tengah masyarakat dan mengatasi ketimpangan yang terjadi. Ada 3 (tiga) pendekatan yang menjadi strategi untuk mencapai asumsi yang diinginkan. Pendekatan tersebut adalah pendekatan partisipasi politik, pendekatan perubahan sosial dan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan-pendekatan dilakukan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terhadap aturan-aturan yang mengikat terhadap peserta pemilu dan relasi ideal yang harus terbentuk antara peserta dan pemilih. Hal ini dilakukan agar dapat mendegradasi pragmatisme dalam pemilu yang muncul akibat ketimpangan yang terjadi. Ini adalah upaya awal untuk menghindari potensi *pseudo democracy* terjadi.

Demokrasi semu yang dihasilkan melalui politik pencitraan memiliki kecenderungan keluar dari prinsip-prinsip demokrasi yang tersusun melalui persepsi dan memiliki makna gejala politik. Kemudian menyatakan makna itu melalui kepercayaan, nilai, dan pengharapan dari pemilih. Namun, ada yang lebih penting dibandingkan citra yang baik yakni kepercayaan publik. Kepercayaan publik tidak hanya dihasilkan melalui pencitraan politik, namun juga dari kinerja kandidat. Kinerja nyata mampu memiliki pengaruh signifikan di hati publik. Ia mampu meninggalkan impresi yang kuat di alam bawah sadar masyarakat. Kinerja dari kandidat dinilai pemilih melalui penyelenggaraan yang dilakukan di pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan

yang baik atau dikenal dengan istilah *good governance* akan menjadi tolah ukur dari pencitraan politik yang terealisasi.

Good governance dapat diartikan sebagai cara mengelola semua hajat publik dengan baik. Kepercayaan publik dan *good governance* merupakan dua hal yang saling berkaitan. Berbeda dengan government atau pemerintah, governance lebih merujuk pada struktur fungsi dan penampilan otoritas publik institusi di semua level. Governance ini meliputi manajemen fungsi publik seperti *regulatory powers are exercised including enforcement*) dalam mengelola masalah negara *public service delivery, public resources (human natural economic dan financial dan public* (Zuhro, 2016).

Pencitraan mungkin bisa mendatangkan keuntungan dalam jangka pendek, namun itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kerugian jangka panjang yang dapat ditimbulkannya. Sebagai contoh, pada masa kampanye para calon berlomba untuk memoles citra dirinya sebaik mungkin. Dalam jangka pendek mungkin ia bisa mendapat keuntungan. Namun jika citra yang ditampilkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, lambat laun publik akan mengetahui dan bukan tidak mungkin akan menyebabkan kerugian yang luar biasa bagi dirinya (Frank, 1992). Tentu kita pernah mendengar sebuah peribahasa, sependai apapun seseorang menyimpan kebohongan, pada akhirnya akan ketahuan juga. Atau jika mengutip ungkapan Christina Tirta, jangan pernah menyembunyikan kebohongan karena kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Seperti bayangan selalu menemukan pemiliknya saat matahari beranjak pergi.

Untuk memberikan panduan bagaimana membangun *good governance*, setidaknya, terdapat 4 (empat) prinsip yang saling berkaitan yaitu *Accountability, Transparency, dan Democratization, Rule of law* (Mardiasmo, 2009). Berikut penjelasan dari prinsip-prinsip *good governance*.

a. *Accountability* (Akuntabilitas)

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas mutlak diperlukan agar setiap lembaga Negara dan penyelenggara Negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan public yang berlaku serta menghindari penyalahgunaan wewenang.

b. *Transparency* (Transparansi)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang dimaksud tentu informasi yang berkaitan dengan kepentingan public. Dengan transparansi tersebut, publik diharapkan mampu memperoleh informasi yang mereka butuhkan.

c. *Democratization* (Demokrasi)

Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai proses dalam penyelenggaraan Negara.

- d. *Rule Of Law* (Aturan Hukum) Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara dalam melaksanakan tugasnya. Langkah penyelenggara Negara harus selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini harus menjamin bahwa hukum dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Tidak pantas lagi kita masih mendengar adagium yang berbunyi, hukum tumpul ke atas, runcing ke bawah.

Jika prinsip-prinsip tersebut diterapkan dengan baik dan sungguh-sungguh maka dapat mencapai hasil yang diinginkan oleh *stakeholder*. Dalam prinsip *Good Governance* dapat terlihat bahwa *good governance* dilakukan dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang professional. *Good Governance* dipandang sebagai alat untuk mewujudkan demokrasi. Menggeser pencitraan politik yang terkesan sentralistik dan monopolistik dimana sudah diatur segalanya, kandidat yang dipercaya public dan menjadi pemerintah yang memiliki wewenang dan sebagai fasilitator yang berkolaborasi dengan *stakeholder* sebagai pilar *good governance*.

Demokrasi Semu dan Politik Pencitraan Dalam Perspektif Islam

Politik pencitraan yang dilakukan partai atau kandidat pasti menggunakan komunikasi yang akan menampilkan dirinya sebegus mungkin untuk menjaa citranya di depan publik. Sebagaimana dalam komunikasi bisnis dan komunikasi politik atau yang lainnya, komunikasi dalam perspektif Islam, harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kebaikan, kejujuran dan kebenaran. Jika merujuk literatur komunikasi Islam, ada beberapa prinsip komunikasi Islam yang lazim dipahami, yaitu: 1. *Qaulan sadida*; 2. *Qaulan baligha*; 3. *Qoulan ma'rufa*; 4. *Qaulan Karima*; 5. *Qaulan Layina*; 6. *Qaulan masyura* (Rakhmat, 1996). Dua dari 6 prinsip komunikasi yang telah disebutkan tadi menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam proses pencitraan politik. Pertama, *qawlan sadida* (berkata dengan benar dan jujur). Pencitraan dari perspektif terminologi ini, harus dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran. Apa yang disampaikan harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Islam memandang bahwa komunikasi harus dilakukan dengan benar, faktual dan tidak mengandung unsur rekayasa atau manipulatif. Kebenaran dan kejujuran, merupakan landasan filosofis komunikasi politik Islam seperti yang dijelaskan dalam surag *al-Ahzab* ayat 70-71:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang

siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar". (QS. Al-Ahzab, 70-71)

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa komunikasi politik Islam tidak hanya menekankan kepada komunikator, tetapi menekankan juga pada kemaslahatan komunikan. Seorang komunikator dituntut untuk menghindari kebohongan yang dimungkinkan dapat merugikan komunikator. Hal ini dapat diperhatikan dari bahasa Alquran yang sunyi dari kebohongan dalam mengajak manusia dengan bahasa yang benar (*qoulan sadida*) sehingga akan membekas pada jiwa manusia. Pesan lain yang dapat ditangkap dari ayat di atas, bahwa pesan-pesan yang mengandung makna menjatuhkan atau mendiskreditkan harus segera koreksi. Ucapan yang arahnya meruntuhkan, pada saat yang sama harus pula diiringi dengan pesan-pesan perbaikan. Artinya, kritik yang disampaikan harus mendidik dan konstruktif. Dalam konteks lain kata Wahyu Ilahi, pesan yang disampaikan merupakan kalimat-kalimat yang baik sesuai dengan kebiasaan pada masing-masing masyarakat, dan juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai ke-ilahian (Ilahi, 2010).

Kedua, *qawlan ma'rufan* (perkataan yang baik). *Qawlan ma'rufan* sebagaimana dijelaskan Ilahi dapat diartikan sebagai ungkapan atau ucapan yang pantas dan baik. Pantas maksudnya adalah sebagai kata-kata yang terhormat, sedangkan baik diartikan sebagai kata-kata yang sopan. Istilah Jalaluddin Rahmat kata ilahi adalah pembicaraan yang bermanfaat, memberikan pengetahuan, mencerahkan pemikiran dan menunjukkan pemecahan terhadap kesulitan orang yang lemah. Bila ditelaah lebih jauh, *qawlan ma'rufan* menggambarkan mengenai etika berkomunikasi dengan komunikan. Misalnya, bagaimana etika seorang komunikator yang memiliki kekuatan (power) terhadap masyarakat yang lemah, seperti orang miskin, anak-anak yatim dan sebagainya. Bagaimana etika seorang komunikator dalam berkomunikasi terhadap orang yang lebih mengedepankan emosi daripada akhlaknya (Ilahi, 2010).

Prinsip-prinsip komunikasi yang telah dijelaskan di atas sangat dekat dengan komunikasi islam. Prinsip ini diterapkan sebagai upaya untuk mewujudkan komunikasi politik islam tanpa menjadikannya sebagai topeng/senjata dalam pemilihan umum. Calon kandidat yang memosisikan dirinya sebagai komunikator harus mempersiapkan diri sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip komunikasi islam yang telah djelaskan sebelumnya. Pesan yang disampaikan juga harus di formulasikan, dikemas dan disajikan sesuai dengan nilai-nilai tersebut tanpa ada keberpihakan ke satu etnis, budaya maupun agama.

Dalam dunia politik, istilah pencitraan merupakan suatu hal yang wajar dan logis. Pencitraan merupakan aspek penting yang tak terpisahkan untuk memperoleh jumlah suara yang lebih besar, dukungan maupun simpati publik. Oleh karenanya, banyak para elit politik yang menggunakan pencitraan diri maupun kelompoknya guna memperoleh daya dukung masyarakat. Namun

demikian, ada yang perlu digarisbawahi menyangkut bagaimana semestinya politik pencitraan tersebut dilakukan, utamanya jika ditinjau dari segi perspektif Islam

Menurut analisis penulis, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam proses politik pencitraan jika ditinjau dari perspektif Islam, yaitu: pertama, menjaga agar opini publik tetap bergerak sehat. Kedua, menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menyampaikan pesan secara jujur.

b. Menjaga Opini Publik Tetap Sehat

Opini publik sebagai kekuatan politik tidak hanya mampu menopang suatu pemerintahan atau kekuasaan, melainkan juga memiliki kekuatan untuk mengulingkannya. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Soeharto dan Abd Rahman Wahid (Gus Dur), baik melalui cara yang konstitusional (melalui parlemen), maupun melalui pergolakan-pergolakan atau aksi-aksi massa, atau kedua-keduanya (aksi massa dan parlemen). Opini publik dapat dibentuk, dipelihara, dibina dengan baik oleh semua kekuatan politik, melalui komunikasi politik yang intensif, persuasif, informatif, edukatif dan koersif. Karakteristik yang paling penting dari opini publik yang telah mendorong para ilmuwan sosial untuk menyelidikinya adalah kekuatannya yang luar biasa terhadap pemerintah dan individu masyarakat.

Namun demikian, dalam perspektif Islam, pencitraan yang dilakukan harus dilakukan secara benar, tidak mengandung kebohongan dengan kata lain harus tetap menjunjung tinggi etika komunikasi. Opini yang dibangun harus didasarkan pada kebenaran dan tidak mengandung fitnah dan kebohongan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam membangun pencitraan nama baik terhadap Abu Bakar dan sahabat lainnya. Demikian pula pencitraan nama baik terhadap mereka yang diangkat sebagai saksi guna menunaikan hak orang lain. Pencitraan yang dilakukan Rasulullah SAW didasari kepada ketakwaan. Bahkan tercatat dalam sejarah keislaman, bahwa para sahabat Rasulullah SAW pada masa kepemimpinannya juga melakukan pencitraan. Sepeninggal Rasulullah SAW, Imam Ali tetap melanjutkan perjuangan Rasul, yakni menghapuskan segala bentuk penindasan terhadap sesama manusia. Ali tampil sebagai pemimpin yang tidak berjarak dengan rakyatnya, kehidupan sehari-harinya terlihat tidak seperti pemimpin kebanyakan, tempat tinggal, makanan serta pakaiannya sangat sederhana, sehingga orang miskinpun hidup lebih baik daripada kehidupannya. Padahal Ali adalah seorang pemimpin yang memiliki kesempatan untuk hidup mewah selama jadi pemimpin (Jordac, 1996).

Dengan demikian, membangun pencitraan, berarti melakukan proses perbaikan dengan kesadaran dan sungguh-sungguh secara gradual, yakni melakukan perbaikan dari waktu ke waktu secara bertahap. Pencitraan dalam pandangan Islam, bukan sekedar mengemas secara baik tampilan luarnya, tetapi tampilan luar tersebut diharapkan dapat

menjadi indikator kebaikan di dalamnya. Ini erat kaitannya dengan sebuah pepatah Arab yang dikutip oleh Munir, ‘*Az zahiru yadullu alal batin* (hiasan lahir menunjukkan hiasan batin)’. Hal ini kata Munir menggambarkan bahwa penampilan *dzahir* seseorang sangat berkaitan erat dengan hal-hal yang bersifat batin dalam dirinya. Karena biasanya dalam menilai batin seseorang dimulai dari penampilan luarnya. Inilah pentingnya mengapa harus menjaga penampilan fisik (Munir, 2010).

c. Menjaga Kepercayaan Masyarakat

Menurut perspektif Islam, pencitraan haruslah dilakukan dengan sebetuk kejujuran, sehingga melahirkan kepercayaan yang otentik. *Trust* dalam pandangan Islam tidak jauh berbeda dengan amanah (terpercaya) yang merupakan salah satu dari sifat Nabi Muhammad SAW. Amanah berarti tidak memiliki prasangka buruk kepada orang lain, tidak berkhianat dan juga tidak menyebarkan fitnah tentang sesuatu apapun. Hal ini seperti yang tergambar dalam Alquran, surat An Nisa ayat 58:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat”. (QS.4:58)

Ayat ini turun ketika Ali mengambil kunci ka’bah secara paksa dari Utsman bin Thalhah Al-Hajabi yang saat itu menjadi penjaga Ka’bah. Tetapi dia menolaknya dan berkata: “Seandainya aku tau bahwa dia adalah Rasulullah SAW, aku tidak akan menolaknya.” Kemudian Rasulullah memerintahkan agar kunci itu dikembalikan kepadanya dan bersabda: “*Ambillah untuk selamanya dan seterusnya*.” Kemudian, dia merasa takjub akan hal tersebut. Lantas Ali membacakan ayat tersebut kepadanya dan ia langsung masuk Islam. Ketika Utsman bin Thalhah Al-Hajabi menjelang meninggal dunia, ia memberikan kunci itu kepada adiknya Syaibah, kemudian dipegang oleh anaknya. Kendati ayat ini turun karena sebab yang khusus, tetapi keumumannya bisa dijadikan sebagai pegangan, dengan *qarinah* (indikasi) jamak (Junaidi, 2011).

Kinerja Pemerintah DKI Jakarta dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan

Salah satu fenomena pencitraan politik berbasis agama yakni gerakan 212 yang mendukung Anies Baswedan dalam membentuk citra politik saat menjadi kandidat Pilgub 2018. Dinilai telah membuat framing yang mengarahkan keputusan masyarakat dalam menentukan pilihan penggunaan hak suara yang didasari oleh framing gerakan 212 yang bernuansa Agama. Praktik berdemokrasi tidak hanya sebatas procedural melalui pemilu, masyarakat harus dapat ikut serta atau dilibatkan

dalam proses demokrasi dalam bentuk apapun. Namun, dalam kenyataannya politik pencitraan membangun perspektif masyarakat dengan preferensi yang tunggal diatas berbagai kepentingan dan latarbelakang preferensi. Dalam praktiknya, politik pencitraan selalu menggunakan isu SARA sebagai media dalam tindakan-tindakan pencitraan. Hal tersebut terlihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pasangan calon Anies-Sandi saat mencalonkan diri di Pilkada DKI Jakarta 2018. Penelitian dari Dony Arung Triantoro (2019), menemukan fenomena bahwa saat pencalonan Anies-Sandi terindikasi politik identitas. Politik identitas oleh Anies-Sandi dilakukan melalui facebook dan instagram berupa penyebutan identitas agama seperti kata “seiman, Islami, kami berpeci dan syariah” (Triantoro, 2019). Seharusnya dalam praktik demokrasi yang terwujud dalam pesta rakyat pemilu khususnya di indonesia yang mengangkat prinsip Luber dan Jurdil, maka hendaknya pemilihan umum yang menjadi tempat bertarungnya kandidat dari berbagai latar belakang suku ras dan agama harus bebas dari ketimpangan keadilan.

Praktik-praktik politik pencitraan dengan menggunakan identitas-identitas latar belakang masyarakat yang tunggal cenderung mengabaikan preferensi dari sisi minoritas. Framing agama dalam politik pencitraan pun dijadikan sebagai blok-blok pembatas, mana yang harus ditentukan oleh pemilik suara dan mengabaikan opsi-opsi lain. Opsi alternatif lain yang bisa menjadi pilihan yang lebih baik dari pada pilihan yang di Framing wajib untuk di pilih. Sehingga, ide kebebasan yang merupakan ciri khas dari demokrasi pun terabaikan dalam praktik tersebut, kemudian praktik politik identitas mengarah pada situasi demokrasi semu (*Pseudo Democracy*). Prinsip Demokrasi seharusnya memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menggunakan hak suaranya tanpa memaksa untuk memilih satu pasangan calon. Menjunjung konsepsi mengenai partisipasi politik masyarakat berangkat dari anggapan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Keadaan demokrasi seperti itu di modern ini sudah sulit ditemui, hak suara masyarakat memang dibebaskan. Namun, fikiran dan ide untuk memilih masih dibelenggu oleh praktik pencitraan politik yang menggunakan politik identitas framing agama sebagai alat yang secara tidak langsung mengatur pemilik hak suara untuk memilih.

Pasangan calon Anies-Sandi saat Pilgub menjadi contoh praktik demokrasi di Indonesia yang menggunakan pencitraan politik dengan Framing agama melalui masa Aksi 212 yang saat itu menjadi pendukungnya. Masa Aksi 212 menjadi salah satu bentuk partisipasi politik yang menjadi motor penggerak pandangan-pandangan berlandaskan agama dalam menentukan pilihan publik pada Pilgub 2018. Keterlibatan Anies-Sandi dalam gerakan 212 secara eksplisit tidak bisa dipungkiri. Tercatat dalam pemberitaan online, Anies menghadiri reuni para pendiri dan massa Aksi 212 di Jakarta pada bulan desember 2019. Dalam media CNBC Indonesia, tertulis bahwa Anies menyampaikan terima kasih kepada semua yang ikut dan menciptakan keteduhan di Jakarta. Hal ini

membuktikan dengan memberikan izin atas penyelenggaraan acara reuni Massa Aksi 212 hubungan antara Anies dan Massa 212 tetap terjalin bahkan setelah kemenangannya di Pilgub Jakarta 2018.

Dalam penelitian Elis Nugraha Dkk (2020), menjelaskan hasil penelitian mereka terkait Aksi 212 dan Kemenangan Anies-Sandi pada Pemilihan Gubernur Jakarta 2017 bahwa Aksi 212 memiliki peran besar dalam memenangkan pasangan Anies-Sandi pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Hal tersebut terlihat dari 2 (dua) hal yakni, modal sosial yang dimiliki oleh jaringan aktivitas Aksi 212 dengan pemanfaatan kepercayaan publik dengan menggunakan fatwa MUI dan pengaruh para tokoh muslim. Aksi 212 sukses mempengaruhi perilaku pemilih Jakarta yang memicu banyaknya deklarasi dukungan Anies-Sandi sehingga akhirnya keduanya memenangkan Pilgub tersebut (Septiana et al., 2020). Anies Baswedan melalui momentum Aksi 212 tidak terlepas dari politik pencitraan yang ia manfaatkan untuk membangun kepercayaan publik melalui politik identitas framing agama. Adapun kepercayaan (*Trust*) publik, merupakan pondasi dari suatu hubungan antara kedua pihak yang akan terjalin. Menurut Yilmaz dan Atalay bahwa kepercayaan mengandung suatu sikap yang menganggap bahwa individu atau kelompok bermaksud baik, adil dan sesuai dengan norma etika (Septiana et al., 2020).

Dalam penelitian Elis Nugraha Dkk (2020) juga menjelaskan bahwa ketika para ulama yang sebagai motor penggerak Aksi 212 menentukan pilihannya kepada seorang calon kepala daerah yang Muslim, maka umat muslim atau masyarakat yang beragama Islam akan mendukung calon tersebut. Pilihan mereka jatuh pada Anies-Sandi yang dianggap seiman, hal tersebut kemudian berdampak terhadap kemenangan Anies-Sandi pada Pilgub Jakarta 2017. Pencitraan politik yang dilakukan Anies-Sandi dan Aksi 212 berhasil dalam mempengaruhi masyarakat dan mendapatkan kepercayaan publik. Hal ini terlihat dari kemenangan Anies-Sandi saat Pilgub DKI Jakarta 2017 dengan perolehan suara 52.73% suara. Pencitraan politik dengan framing agama ini terlihat jelas dengan dukungan para pelaku Aksi 212. Dimana kepercayaan publik yang didapat digunakan untuk memobilisasi masa Aksi 212 untuk mendukung Anies-Sandi.

Pada reuni Aksi Massa 212 tahun 2018 yang dihadiri Anies setahun pasca dilantikannya ia menjadi Gubernur DKI Jakarta justru menjadi ajang bagi Anies untuk mencari dukungan. Hal tersebut ditandai dengan pernyataannya yang liput di media Tirto.id bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung capaian kinerjanya sebagai kepala daerah dalam reuni akbar 212. Anies mengklaim bahwa kepemimpinannya selama setahun ini telah membuahkan hasil, salah satunya yakni menghentikan reklamasi hingga merealisasikan janji DP 0 rupiah. Direktur Populi Center juga berpendapat bahwa Anies Baswedan yang di nilai mencari dukungan, sebab momentum reuni 212 menjadi momen yang baik untuk menyampaikan pesan bagi aktor yang didukungnya. Pengamat tata kota menilai bahwa janji kampanye Anies-Sandi pada Pilgub DKI Jakarta 2017 untuk memorandum reklamasi di Teluk Jakarta mencerminkan keinginan masyarakat yang tinggal

di sekitaran lahan yang akan di targetkan menjadi pulau reklamasi. Hal ini dilakukan karena sebagian masyarakat yang tinggal di daerah tersebut bermata pencaharian sebagai nelayan, sehingga reklamasi dapat mengganggu sumber pendapatan nelayan dengan berkurangnya komoditas laut secara drastis.

Upaya-upaya Anies dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di bawah komandonya, tidak lepas dari segala citra yang dibangunnya saat menjadi kandidat di Pilgub DKI Jakarta 2017. Tidak jarang permasalahan yang dihadapi Pemprov Jakarta ditanggapi public dengan membawa citra Anies yang lekat di dirinya sejak sebelum dilantik menjadi gubernur. Banjir-banjir besar yang terjadi di Jakarta menjadi bencana tahunan yang tak kunjung terselesaikan dapat menjadi alat bagi oposisi untuk menjatuhkan kinerja Anies.

Meskipun pencitraan politik dengan framing agama berhasil dilakukan oleh Massa Aksi 212 yang sukses menghantarkan Anies-Sandi menjadi pemenang Pilgub DKI Jakarta 2017, hal tersebut tidak serta merta mencerminkan kapabilitas pasangan tersebut menjadi pemimpin di DKI Jakarta. Kepercayaan public menurun, dengan dibuktikan rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Anies selama 2 tahun menjabat. Survey dari Populi Sentre menunjukkan trend penurunan kepuasan publik terhadap kinerja Anies (tempo.com, 2019). Tercatat pada 2019, tingkat kepercayaan public berada di angka 65,5%. Terjadi penurunan saat 2021, yang di rilis oleh Nusantara Strategic Network yang menunjukkan tingkat kepuasan publik mencapai 39,3%. Namun prestasi yang diraih oleh DKI Jakarta sejak dipimpin oleh gubernur Anies pun lebih kurang diilirik public dibanding dengan permasalahan yang sedang melanda DKI Jakarta.

Simpulan

Islam dan demokrasi kerap dipertentangkan oleh sejumlah kelompok kecil di Indonesia. Padahal senyatanya, keduanya hadir secara sinergis dan berkait-kalidan satu sama lain. Hal tersebut ditopang oleh cara pandang mayoritas muslim di Indonesia, yang selalu berusaha mencari titik temu di antara berbagai konsepsi kehidupan (termasuk konsep bernegara) dari berbagai arah kebudayaan dan peradaban sehingga memunculkan pencitraan yang dikemas dalam bingkai Islam. Gerak langkah mayoritas muslim yang moderat inilah yang seyogyanya kita rawat bersama.

Upaya yang bisa dilakukan tanpa menghilangkan unsur keIslaman dan menjunjung tinggi adanya keberagaman, maka dapat diterapkan sebuah prinsip komunikasi politik Islam, yaitu *Qawlan sadida* (berkata dengan benar dan jujur) dan *Qawlan Ma'rufan* (perkataan yang baik) tanpa ada unsur kontroversi dan provokasi. Politik pencitraan yang seharusnya dilakukan dengan menggunakan komunikasi politik Islam, yaitu memberikan pesan secara jujur serta otentik dan tidak manipulatif.

- a. Melihat kemajemukan yang ada di Indonesia, maka perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah terhadap politik dalam bingkai agama yang dapat menjadikan kontroversi antar umat beragama.
- b. Setiap calon harus menjauhi kampanye yang menonjolkan identitas lebih-lebih bernuansa SARA dalam arena pemilu sebagai langkah untuk menghindari meningkatnya sentimen identitas yang terjadi di Indonesia. Hal ini harus dilakukan dalam upaya pembangunan demokrasi yang substansial dan beradab di Indonesia.

Pencitraan politik itu dikemas dengan pola komunikasi yang baik sebagaimana yang ada dalam konsep komunikasi perspektif Islam, maka hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik yang berhasil dibangun oleh kandidat akan menjadi kekuatan bagi terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Daftar Pustaka

- Azhar, A. A. (2017). Politik dan Pencitraan dalam Konteks Islam. *Jurnal Analytica Islamic, 1*.
- Frank, J. (1992). *Public Relation*. Erlangga.
- Goldmas, Smith, C. (2010). *Building Trust in Government: Inovation in Governance Reform in Asia*. United Nation University.
- Ilahi, W. (2010). *Komunikasi DAKwah*. Remaja Rosdakarya.
- Jordac, G. (1996). *Suara Keadilan, Sosok Ali bin Abi Thalib, terj. Muhammad Al-Sajjad*. Lentera.
- Junaidi, N. (2011). *Tafsir Jalalain Jilid1*. eIBA Fitrah Mandiri Sejahtera.
- Kristiadi, J. (2008, July 22). Kampanye dan Demokrasi Prosedural. *Kompas.com*.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntabilitas Sektor Publik*. Andi.
- Munir, A. (2010). *Super Teacher (Sosok Guru yang Dihormati dan dicintai)*. Pedajogja.
- Newman, P., & Kenworthy, J. (1999). *Sustainability and cities: extending the metabolism model*. Island Press.
- Rakhmat, J. (1996). *Islam Aktual*. Mizan.
- Septiana, E. N., Al-Hamdi, R., & Gusmi, A. D. (2020). Aksi 212 dan Kemenangan Anies-Sandi pada Pemilihan Gubernur Jakarta 2017. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial*

Dan Ilmu Politik, 10(2).

Simon, J. (2006). *The Power Of Politic Image*. American Political Science Assosiation.

Suntara, I. (2010). *Kapita Selekta Politik Islam*. Pustaka Setia.

tempo.com. (2019, October 14). Tingkat Kepuasan Publik Turun, Anies Baswedan: Saya Baca Dulu. *Tempo.co*. <https://metro.tempo.co/read/1259717/tingkat-kepuasan-publik-turun-anies-baswedan-saya-baca-dulu/full&view=ok>

Triantoro, D. A. (2019). Praktik Politik Identitas dalam Akun Media Sosial Anies-Sandi. *Jurnal Ilmu Komunikasi, 16(1)*.

Zuhro, R. S. (2016). Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*.